

ANALISIS TINGKAT PENGANGGURAN DI JAWA TENGAH TAHUN 1997-2010



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

RONNY PITARTONO
NIM. C2B605147

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ronny Pitartono
Nomor Induk Mahasiswa : C2B605147
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Ilmu Ekonomi dan
Studi Pembangunan (IESP)
Judul Skripsi : **ANALISIS TINGKAT PENGANGGURAN
DI JAWA TENGAH TAHUN 1997-2010**
Dosen Pembimbing : Banatul Hayati, SE, M.Si

Semarang, 01 Oktober 2012

Dosen Pembimbing,

Banutul Hayati, SE, M.Si
NIP. 19680316 199802 2 001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Ronny Pitartono
Nomor Induk Mahasiswa : C2B605147
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan (IESP)
Judul Skripsi : **ANALISIS TINGKAT PENGANGGURAN DI
JAWA TENGAH TAHUN 1997-2010**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 01 Oktober 2012

Tim Penguji

1. Banatul Hayati, SE, M.Si (.....)
2. Dr. Hadi Sasana, SE, M.Si (.....)
3. Nenek Woyanti, SE, M.Si (.....)

Mengetahui Atas Nama Dekan,
Pembantu Dekan I

(Anis Chariri, SE, M.Com, PhD, Akt)
NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ronny Pitartono, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Analisis Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah Tahun 1997-2010 adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah di berikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 01 Oktober 2012
Yang membuat pernyataan,

(Ronny Pitartono)
NIM. C2B605147

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

(Q.S Al-Insyirah 6-7)

Bermimpilah, maka Tuhan akan memeluk mimpi – mimpimu

(Andrea Hirata)

Perbaharuilah perahu, sungguh laut itu dalam....

Bawalah bekal secara sempurna, sungguh perjalanan itu panjang....

Ringankanlah bawaan, sungguh perjalanan menuju puncak amat berat....

Murnikanlah amal, sungguh Allah selalu melihat amal kita....

Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

Allah SWT Tuhan Pencipta Alam beserta isinya dan Pemberi Segalanya
Kedua Orang tua dan Kakakku. Kakak Ipar serta Kedua Keponakanku tersayang
Insya Allah untuk semua orang

ABSTRACT

The unemployment rate in Central Java have fluctuated from year to year from 1997 to 2010. The unemployment rate is highest in 2007, reaching 7.70%. While the unemployment rate is the lowest in 2001, amounting to 3.70%.

This study aims to analyze the relationship between population, inflation, average - minimum wage districts / cities, and the GDP growth rate with the unemployment rate.

The test results showed a correlation coefficient of independent variables that have a positive and significant relationship with the dependent variable is the number of inhabitants and the minimum wage regencies / municipalities in Central Java. Variable numbers of the population has correlation coefficient of 0.755 while the minimum wage variable districts / cities have numbers correlation coefficient of 0.878 so it can be concluded that the higher the population, the greater the minimum wage and district / city positively and significantly associated with the level of unemployment in Central Java. Variable rate of inflation has correlation coefficient of -0.173 points while the variable rate of GDP growth has a correlation coefficient of -0.179 so it can be concluded that the variable inflation rate and GDP growth rate variable has a negative and significant relationship with the level of unemployment in Central Java. Correlation coefficient of inflation rate and GDP growth rate indicated by the negative sign means the rate of inflation and GDP growth rate has no significant relationship with unemployment.

Keywords: unemployment rate, population, inflation, average - minimum wage districts / cities, the growth rate of GDP.

ABSTRAKSI

Tingkat pengangguran di Jawa Tengah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun pada tahun 1997 sampai pada tahun 2010. Tingkat pengangguran paling tinggi terjadi pada tahun 2007, yaitu mencapai 7,70 %. Sementara tingkat pengangguran di tahun 2001 adalah terendah, yaitu sebesar 3,70%.

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara jumlah penduduk, tingkat inflasi, rata – rata upah minimum kabupaten / kota, dan laju pertumbuhan PDRB dengan tingkat pengangguran.

Hasil uji koefisien korelasi menunjukkan variabel independen yang mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan variabel dependen adalah jumlah penduduk dan upah minimum kabupaten / kota di Jawa Tengah. Variabel jumlah penduduk memiliki angka koefisien korelasi sebesar 0,755 sementara variabel upah minimum kabupaten / kota memiliki angka koefisien korelasi sebesar 0,878 sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk, dan semakin besar upah minimum kabupaten / kota berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat pengangguran di Jawa Tengah. Variabel tingkat inflasi memiliki angka koefisien korelasi sebesar -0,173 sementara variabel laju pertumbuhan PDRB memiliki angka koefisien korelasi sebesar -0,179 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat inflasi dan variabel laju pertumbuhan PDRB memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan dengan tingkat pengangguran di Jawa Tengah. Angka koefisien korelasi tingkat inflasi dan laju pertumbuhan PDRB yang ditunjukkan oleh tanda negatif berarti tingkat inflasi dan laju pertumbuhan PDRB tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat pengangguran.

Keywords : tingkat pengangguran, jumlah penduduk, tingkat inflasi, rata – rata upah minimum kabupaten / kota, laju pertumbuhan PDRB.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamin. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “ Analisis Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada program Sarjana Ekstensi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Banatul Hayati, SE., M.Si, selaku dosen pembimbing yang dengan segala kesabaran memberikan bimbingan, solusi dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kebijaksanaan dan motivasi kepada penulis.
3. Johanna Maria Kodoatie, SE., M.Ec, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dan dosen wali yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan saran didalam kegiatan akademis selama penulis belajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
4. Evi Yulia Purwanti, SE., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Terima kasih atas kebijaksanaan dan motivasi kepada penulis.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan bekal ilmu, staf administrasi dan staf perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
6. Seluruh staf BPS Jateng, yang telah membantu penulis dalam melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibuku tercinta untuk segala kasih sayang, perhatian, dukungan, dan doanya. Kakakku dan Kakak Ipar tercinta serta keponakanku: Denny dan Hamid, serta keponakanku : Aira dan Aura untuk kasih sayang, perhatian, dukungan dan doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga besar IESP 2005 : Pristyani, Ruth, Gloria, Dini, Wiwid, Ria, Pipit, Hera, Indah, Ariska, Fita, Naning, Mbak Dinar, Hafid, Panji, Antok, Gadang, Cholif, Andi, Andri, Deva, Reza, Hawik, Bono, Candra, Edwin, Ridho, Bowo, Pradana, Gilang, Yardin, Prima, Iwan. Terima kasih atas dukungan, perhatian dan kebersamaannya serta telah bersama-sama menimba ilmu dikampus ini.
9. SahabatQuw komplek perumahan : Meyda, Jiwan, Dommy, Dewo terima kasih semuanya atas dukungan, perhatian dan kebersamaannya.
10. Rekan-rekan Kerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah : Bapak Endi Faiz selaku Kasubag Program serta staf Ibu Retno, Ibu Susi, Ibu Rokhayah, Ibu Eny, Mbak Dessy, Mbak Desiani, Mas Imam, Mas Iman dan Luqmanul dibagian perencanaan untuk dukungan, bantuan, kebersamaannya serta izin studi dan penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis

Ronny Pitartono
C2B605147

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Pengesahan Kelulusan Ujian	iii
Halaman Pernyataaan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Moto dan Persembahan	v
<i>Abstract</i>	vi
Abstraksi	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II. Tinjauan Pustaka	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Teori Pengangguran	13
2.1.2 Teori Inflasi.....	17
2.1.3 Teori Upah	26
2.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi	30
2.1.5 Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Pengangguran.....	31
2.1.6 Hubungan Tingkat Inflasi Terhadap Jumlah	

	Pengangguran.....	32
	2.1.7 Hubungan Besaran Upah Dengan Jumlah Pengangguran.....	34
	2.1.8 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Pengangguran.....	35
	2.2 Penelitian Terdahulu	37
	2.3 Kerangka Pemikiran.....	40
	2.4 Hipotesis.....	43
BAB III.	Metode Penelitian.....	44
	3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	44
	3.2 Jenis dan Sumber Data.....	46
	3.3 Metode Pengumpulan Data.....	47
	3.4 Metode Analisis	48
	3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif	48
	3.4.2 Analisis Korelasi	49
	3.4.2.1 Arti Nilai Koefisien Korelasi	50
	3.4.2.2 Arah Hubungan Korelasi	51
	3.4.2.3 Melihat Signifikansi Hubungan	51
BAB IV.	Hasil dan Pembahasan.....	52
	4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	52
	4.1.1 Letak Geografis dan Wilayah Administrasi.....	52
	4.1.2 Penduduk dan Kepadatan Penduduk.....	53
	4.2 Analisis Data dan Pembahasan	55
	4.2.1 Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah.....	55
	4.2.2 Tingkat Inflasi Jawa Tengah.....	57
	4.2.3 Upah Minimum Jawa Tengah.....	58
	4.2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah.....	60
	4.3 Hasil Korelasi Karl Pearson	61
	4.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan	61

4.4.1 Hubungan Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran	61
4.4.2 Hubungan Tingkat inflasi dan Tingkat Pengangguran...	62
4.4.3 Upah Minimum Kabupaten / Kota dan Tingkat Pengangguran.....	62
4.4.4 Laju Pertumbuhan PDRB dan Tingkat Pengangguran...	63
 BAB V. Penutup.....	 64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran.....	65
 Daftar Pustaka.....	 66
 Lampiran – Lampiran.....	 70

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	: Jumlah Angkatan Kerja, Mencari Kerja dan Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah Tahun 1997-2010	3
Tabel 1.2	: Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran Di Jawa Tengah Tahun 1997-2010	6
Tabel 1.3	: Rata-Rata Upah Minimum Di Jawa Tengah Tahun 1997-2010.....	8
Tabel 1.4	: Laju Pertumbuhan PDRB (<i>Atas Dasar Harga Berlaku</i>) Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2010 (Percent)	10
Tabel 4.1	: Kepadatan Penduduk di Jawa Tengah.....	54
Tabel 4.2	: Jumlah Angkatan Kerja, Jumlah Mencari Kerja dan Tingkat Pengangguran Di Jawa Tengah Tahun 2010.....	56
Tabel 4.3	: IHK dan Inflasi Jawa Tengah.....	57
Tabel 4.4	: KHL dan Rata-Rata Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2010.....	58
Tabel 4.5	: Laju Pertumbuhan PDRB (<i>Atas Dasar Harga Berlaku</i>) Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2010 (Percent)	60
Tabel 4.6	: Hasil Korelasi Hubungan Inflasi, Upah Minimum, Laju Pertumbuhan PDRB Terhadap Pengangguran di Jawa Tengah Tahun 1997 – 2010.....	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Hubungan Jumlah Penduduk dengan Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah Periode Tahun 1997-2010.....	31
Gambar 2.2 : Hubungan Tingkat Inflasi dengan Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah Periode Tahun 1997-2010.....	33
Gambar 2.3 : Hubungan Besaran Upah dengan Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah Periode Tahun 1997-2010.....	35
Gambar 2.4 : Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah Periode Tahun 1997-2010	37
Gambar 2.5 : Kerangka Pemikiran.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A	
Data Tingkat Pengangguran, Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, UMK Jateng, dan Laju Pertumbuhan PDRB di Jawa Tengah Tahun 1997-2010	71
LAMPIRAN B	
Hasil Korelasi Hubungan Inflasi, Upah Minimum, Laju Pertumbuhan PDRB Terhadap Pengangguran di Jawa Tengah Tahun 1997 – 2010.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu hal yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan suatu negara, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Pembangunan dilakukan dalam berbagai sektor kehidupan dan melibatkan kegiatan produksi. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang (Sadono Sukirno, 1994). Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan mutlak (Todaro, 1988).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun (Tulus T.H. Tambunan, 2009). Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi

tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan (Tulus T.H. Tambunan, 2009).

Menurut Todaro (1988) pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan atau pendapatan per kapita, namun harus pula melihat bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan kepada penduduk dan mengetahui siapa yang mendapat manfaat dari pembangunan tersebut. Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satu di antaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran. Selain itu dengan tingkat pengangguran, dapat dilihat pula ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu masyarakat negara tersebut. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya, Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja.

Tabel 1.1
Jumlah Angkatan Kerja, Mencari Kerja dan Tingkat Pengangguran di
Jawa Tengah Tahun 1997-2010

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja, Mencari Kerja dan Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah Tahun 1997-2010		
	Angkatan Kerja	Mencari Kerja	Tingkat Pengangguran
1997	14.405.167	599.237	4,16
1998	14.949.263	831.435	5,56
1999	15.433.345	867.226	5,62
2000	15.129.122	637.900	4,22
2001	15.644.732	578.190	3,70
2002	15.735.322	984.234	6,25
2003	16.108.778	912.513	5,66
2004	15.974.670	1.044.573	6,54
2005	16.634.255	978.952	5,89
2006	16.408.175	1.197.244	7,30
2007	17.664.277	1.360.219	7,70
2008	16.690.966	1.227.308	7,35
2009	17.087.649	1.252.267	7,33
2010	16.856.330	1.046.883	6,21

Sumber : Jawa Tengah dalam Angka, BPS

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan tingkat pengangguran di Jawa Tengah yang mengalami fluktuasi dari tahun-ketahun. Dimulai pada tahun 1997 sebesar 4,16% sampai pada tahun 2010 sebesar 6,21%. Persentase tingkat

pengangguran paling tinggi dalam tabel tersebut terjadi pada tahun 2007, dimana tingkat pengangguran mencapai 7,70 %. Sementara tingkat pengangguran di tahun 2001 merupakan tahun dengan tingkat pengangguran terendah dalam tabel tersebut, yaitu sebesar 3,70%.

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1994), masalah pengangguran secara terbuka maupun terselubung, menjadi pokok permasalahan dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Berhasil atau tidaknya suatu usaha untuk menanggulangi masalah besar ini akan mempengaruhi kestabilan sosial politik dalam kehidupan masyarakat dan kontinuitas dalam pembangunan ekonomi jangka panjang. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (BPS, 2007)

Permasalahan pengangguran memang sangat kompleks untuk dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator. Indikator-indikator ekonomi yang mempunyai hubungan tingkat pengangguran antara lain jumlah penduduk, laju pertumbuhan PDRB, tingkat inflasi, serta upah minimum kabupaten / kota yang berlaku. Apabila di suatu negara pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan, diharapkan akan berhubungan pada penurunan tingkat pengangguran, hal ini diikuti dengan tingkat upah. Jika tingkat upah naik akan berhubungan pada penurunan tingkat pengangguran pula. Sedangkan tingkat inflasi yang tinggi akan berhubungan pada tingkat pengangguran (Sadono Sukirno, 2008).

Inflasi (*inflation*) adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus. Dari pengertian tersebut maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, maka kenaikan harga yang sementara sifatnya tersebut tidak dapat dikatakan inflasi. Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi ini. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara. Bagi negara yang perekonomiannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara 2 sampai 4 persen per tahun. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2 sampai 4 persen dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Selanjutnya tingkat inflasi yang berkisar antara 7 sampai 10 persen dikatakan inflasi yang tinggi. Namun demikian ada negara yang menghadapi tingkat inflasi yang lebih serius atau sangat tinggi, misalnya Indonesia pada tahun 1966 dengan tingkat inflasi 650 persen.

Kondisi perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan perubahan-perubahan *output* dan kesempatan kerja. Tingkat inflasi yang tinggi berdampak pada pengangguran. Bila tingkat inflasi tinggi, dapat menyebabkan angka pengangguran tinggi, ini berarti perkembangan kesempatan kerja menjadi semakin mengecil atau dengan kata lain jumlah tenaga kerja yang diserap juga akan kecil. Dari sini terlihat bahwa pemerintah harus menjalankan kebijakan makro yang tepat. Inflasi mempunyai hubungan dengan tingkat pengangguran. Apabila tingkat inflasi meningkat, maka harga-harga barang dan jasa akhir juga akan naik, selanjutnya permintaan akan barang dan jasa akhir akan turun, dan akan mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja yang dibutuhkan,

akibatnya akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka. Sehingga inflasi mempunyai hubungan yang negatif terhadap tingkat pengangguran (Sadono Sukirno,1994).

Tabel 1.2
TINGKAT INFLASI DAN TINGKAT PENGANGGURAN
DI JAWA TENGAH TAHUN 1997-2010

TAHUN	TINGKAT INFLASI	TINGKAT PENGANGGURAN
1997	10,88	4,16
1998	67,19	5,56
1999	1,51	5,62
2000	8,73	4,22
2001	13,98	3,70
2002	13,56	6,25
2003	6,07	5,66
2004	5,98	6,54
2005	16,46	5,89
2006	6,08	7,30
2007	6,75	7,70
2008	10,34	7,35
2009	5,83	7,33
2010	7,11	6,21

Sumber : Jawa Tengah dalam Angka, BPS

Menurut tabel 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat inflasi di Jawa Tengah paling tinggi terjadi di tahun 1998 yaitu sebesar 67,19%. Tidak mengherankan mengingat pada tahun itu, Indonesia mengalami gejolak yang berdampak besar pada hampir seluruh sektor termasuk ekonomi. Meski tingkat inflasi pada tahun 1998 merupakan tingkat inflasi tertinggi dalam rentang tahun penelitian ini, ternyata hal tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran tertinggi justru terjadi di tahun 2007, di mana tingkat pengangguran mencapai angka 7,70%.

Permasalahan utama selanjutnya dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan secara langsung dan tidak langsung berhubungan dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena penambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Menurut Mankiw (2000), upah merupakan salah satu faktor yang mempunyai hubungan dengan tingkat pengangguran.

Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu negara akan memberikan hubungan dengan besarnya tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut (Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Menurut J.R. Hicks (dalam Kaufman dan Hotchkiss, 1999)

Menurut Boediono (1991), upah minimum regional merupakan upah minimal yang diterima pekerja dan harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja yang ditetapkan oleh pemerintah di suatu daerah. Sedangkan upah rata-rata propinsi adalah jumlah rata-rata upah minimum di seluruh provinsi (Statistik Indonesia, 2007). Selanjutnya, upah minimum Provinsi Jawa Tengah dijelaskan dalam tabel 1.3, dimana upah minimum yang dimaksud adalah rata-rata upah minimum Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.3
RATA-RATA UPAH MINIMUM DI JAWA TENGAH
TAHUN 1997-2010

TAHUN	UMK JATENG	KHL
1997	113.000	129.194
1998	130.000	146.959
1999	153.000	217.000
2000	185.000	235.750
2001	247.029	270.206
2002	326.581	359.266
2003	366.919	418.851
2004	394.413	415.116
2005	422.576	429.157
2006	491.553	587.495
2007	548.730	634.935
2008	601.419	667.716
2009	679.083	752.390
2010	734.874	801.210

Sumber : Jawa Tengah dalam Angka, BPS

Upah minimum Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dipaparkan dalam tabel di atas, cukup menjelaskan nominal upah minimum Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun. Bila dibandingkan dengan Kebutuhan Hidup Layak rata-rata di Provinsi Jawa Tengah, maka berdasarkan tabel di atas, rata-rata upah minimum Provinsi Jawa Tengah masih di bawah kebutuhan hidup layak sebesar 14,5%.

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah angka PDRB. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Sasana, 2001 dalam Sukmaraga, 2011). Sedangkan yang dimaksud dengan PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita

sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2001). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang. PDRB mempunyai hubungan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Barang dan jasa akhir yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang diminta. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. Produk Domestik regional Bruto (PDRB) digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku dalam satuan persen dari tahun ke tahun. Tabel 1.4 berikut menggambarkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku di Provinsi Jawa Tengah beserta pertumbuhannya.

Tabel 1.4
LAJU PERTUMBUHAN PDRB (*atas dasar harga berlaku*) DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 1997-2010 (percent)

TAHUN	PDRB (harga berlaku)	PERTUMBUHAN (%)
1997	60.296.427	14,84
1998	84.610.226	40,32
1999	101.509.194	19,97
2000	117.782.925	16,03
2001	133.227.558	15,58
2002	151.968.826	14,90
2003	171.881.877	13,10
2004	193.435.263	12,54
2005	234.435.323	21,20
2006	281.996.709	20,29
2007	312.428.807	10,79
2008	367.135.955	17,51
2009	397.903.944	8,38
2010	444.396.468	11,68

Sumber : Jawa Tengah dalam Angka, BPS

Pada tabel 1.4 di atas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan PDRB terbesar terjadi di tahun 1998, yaitu sebesar 40,32% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,93%.

1.2 Rumusan Masalah

Tujuan utama pembangunan ekonomi diantaranya adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu indikator pengukur prestasi kegiatan ekonomi untuk menentukan tingkat kemakmuran suatu masyarakat (Sadono Sukirno, 2004). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya kecenderungan tingkat pengangguran yang meningkat dari tahun 1997 sampai 2010. Beberapa faktor yang diduga mempunyai hubungan dengan tingkat pengangguran di Jawa Tengah adalah

jumlah penduduk, tingkat inflasi, rata-rata upah minimum kab./kota, dan laju pertumbuhan PDRB.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian yang terkait dengan latar belakang masalah sebelumnya, yaitu :

1. Bagaimana hubungan jumlah penduduk dengan tingkat pengangguran di Jawa Tengah?
2. Bagaimana hubungan tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran di Jawa Tengah?
3. Bagaimana hubungan rata-rata upah minimum kab./kota yang ditetapkan pemerintah dengan tingkat pengangguran di Jawa Tengah?
4. Bagaimana hubungan laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah dengan tingkat pengangguran di Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah serta perumusan masalah, dapat ditetapkan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hubungan jumlah penduduk dengan tingkat pengangguran di Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis hubungan tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran di Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis hubungan rata-rata upah minimum kab./kota yang ditetapkan pemerintah dengan tingkat pengangguran di Jawa Tengah.
4. Untuk menganalisis hubungan laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah dengan tingkat pengangguran di Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai referensi bagi pihak – pihak seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah, dengan memberikan informasi tentang tingkat pengangguran di Jawa Tengah serta faktor-faktor apa saja yang berhubungan.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengangguran.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang terdiri dari tingkat pengangguran di Jawa Tengah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini menyajikan landasan teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan ekonomi , teori A.W. Phillips, teori ketenagakerjaan, teori pengangguran, teori upah, dan teori inflasi. Di samping itu, pada bab ini juga terdapat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang dapat diambil.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan tentang metode penelitian yang meliputi variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Pada bab ini dipaparkan tentang dekripsi objek penelitian dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini disampaikan kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan serta keterbatasan pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pengangguran

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Oleh sebab itu, menurut Sadono Sukirno (2004) pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
3. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

Marius (2004) menyatakan bahwa pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau bekerja secara tidak optimal. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*)

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja.

2. Pengangguran Terselubung (*Disguessed Unemployment*)

Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Pengangguran terselubung bisa juga terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, akhirnya bekerja tidak optimal.

3. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*)

Setengah menganggur ialah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari 7 jam sehari. Misalnya seorang buruh bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek, untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya.

Marius (2004) menyatakan bahwa Bila ditinjau dari sebab - sebabnya, pengangguran dapat digolongkan menjadi 7, yaitu:

1. Pengangguran Friksional (Transisional).

Pengangguran ini timbul karena perpindahan orang-orang dari satu daerah ke daerah lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dan karena tahapan siklus hidup yang berbeda.

2. Pengangguran Struktural

Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian yang menyebabkan kelemahan di bidang keahlian lain.

Contoh: Suatu daerah yang tadinya agraris (pertanian) menjadi daerah industri, maka tenaga bidang pertanian akan menganggur.

3. Pengangguran Siklikal atau Siklus atau Konjungtural

Pengangguran ini terjadi karena adanya gelombang konjungtur, yaitu adanya resesi atau kemunduran dalam kegiatan ekonomi. Contoh: Di suatu perusahaan ketika sedang maju butuh tenaga kerja baru untuk perluasan usaha. Sebaliknya ketika usahanya merugi terus maka akan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau pemecatan.

4. Pengangguran Musiman (Seasonal)

Pengangguran musiman terjadi karena adanya perubahan musim.

Contoh: pada musim panen, para petani bekerja dengan giat, sementara sebelumnya banyak menganggur.

5. Pengangguran Teknologi

Pengangguran ini terjadi karena adanya penggunaan alat-alat teknologi yang semakin modern.

6. Pengangguran Politis

Pengangguran ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara langsung atau tidak, mengakibatkan pengangguran.

7. Pengangguran Deflatoir

Pengangguran deflatoir ini disebabkan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan, atau karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja, maka timbullah pengangguran.

2.1.2 Teori Inflasi

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang di jumpai di hampir semua negara di dunia adalah Inflasi. Boediono (1999) menyatakan bahwa definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Kenaikan harga-harga karena musiman, menjelang hari-hari besar, atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai hubungan lanjutan) tidak disebut inflasi. Kenaikan harga semacam ini tidak dianggap sebagai masalah atau "penyakit" ekonomi dan tidak memerlukan kebijaksanaan khusus untuk menanggulangnya. Sedangkan Sadono Sukirno (2002) menyatakan bahwa inflasi dapat didefinisikan sebagai

suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian. Boediono (1999) menyatakan bahwa ada berbagai cara untuk menggolongkan macam inflasi, dan penggolongan mana yang kita pilih tergantung pada tujuan kita. Penggolongan pertama didasarkan atas "parah" tidaknya inflasi tersebut. Di sini kita bedakan beberapa macam inflasi:

1. Inflasi ringan (di bawah 10% setahun)
2. Inflasi sedang (antara 10 -- 30% setahun)
3. Inflasi berat (antara 30 - 100% setahun)
4. Hiperinflasi (di atas 100% setahun).

Sementara Amir (2009) menyebutkan bahwa berdasarkan faktor-faktor penyebab inflasi maka ada tiga jenis inflasi yaitu:

1. inflasi tarikan permintaan (*demand-pull inflation*)
2. inflasi desakan biaya (*cost-push inflation*)
3. inflasi karena pengaruh impor (*imported inflation*)

Inflasi tarikan permintaan (*demand-pull inflation*) atau inflasi dari sisi permintaan (*demand side inflation*) adalah inflasi yang disebabkan karena adanya kenaikan permintaan agregat yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Karena jumlah barang yang diminta lebih besar dari pada barang yang ditawarkan maka terjadi kenaikan harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada saat perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat (*full employment and full capacity*). Dengan tingkat pertumbuhan yang pesat/tinggi mendorong peningkatan permintaan sedangkan barang yang

ditawarkan tetap karena kapasitas produksi sudah maksimal sehingga mendorong kenaikan harga yang terus menerus.

Penentuan parah tidaknya inflasi tentu saja sangat relatif dan tergantung pada "selera" kita untuk menamakannya. Dan lagi sebetulnya kita tidak bisa menentukan parah tidaknya suatu inflasi hanya dari sudut laju inflasi saja, tanpa mempertimbangkan siapa-siapa yang menanggung beban atau yang memperoleh keuntungan dari inflasi tersebut. Kalau seandainya laju inflasi adalah 20% dan semuanya berasal dari kenaikan dari barang-barang yang dibeli oleh golongan yang berpenghasilan rendah, maka seharusnya kita namakannya inflasi yang parah.

Penggolongan yang kedua adalah atas dasar sebab musabab awal dari inflasi. Atas dasar ini kita bedakan dua macam inflasi:

1. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Inflasi semacam ini disebut *demand inflation*.
2. Inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi. Ini disebut *cost inflation*.

Jika permintaan masyarakat akan barang-barang (*aggregate demand*) bertambah misalnya karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang, atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor, atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah, akibatnya tingkat harga umum naik. Bila ongkos produksi naik misalnya, karena kenaikan harga sarana produksi yang didatangkan dari luar negeri, atau karena kenaikan harga

bahan bakar minyak, maka akibat dari kedua macam inflasi tersebut, dari segi kenaikan harga output, tidak berbeda, tetapi dari segi volume output (GDP riil) ada perbedaan. Dalam kasus *demand inflation*, biasanya ada kecenderungan untuk output (GDP riil) naik bersama-sama dengan kenaikan harga umum. Besar kecilnya kenaikan output ini tergantung kepada elastisitas kurva *aggregate supply*; biasanya semakin mendekati output maksimum semakin tidak elastis kurva ini. Sebaliknya, dalam kasus *cost inflation*, biasanya kenaikan harga-harga dibarengi dengan penurunan omzet penjualan barang (kelesuan usaha). Perbedaan yang lain dari kedua proses inflasi ini terletak pada urutan dari kenaikan harga. Dalam *demand inflation* kenaikan harga barang akhir (*output*) mendahului kenaikan barang-barang input dan harga-harga faktor produksi (upah dan sebagainya). Sebaliknya, dalam *cost inflation* kita melihat kenaikan harga barang-barang akhir (*output*) mengikuti kenaikan harga barang-barang *input*/faktor produksi. Kedua macam inflasi ini jarang sekali dijumpai dalam praktek dalam bentuk yang murni. Pada umumnya, inflasi yang terjadi di berbagai negara di dunia adalah kombinasi dari kedua macam inflasi tersebut, dan seringkali keduanya saling memperkuat satu sama lain.

Penggolongan yang ketiga adalah berdasarkan asal dari inflasi. Di sini kita bedakan:

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation).

Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, panen yang gagal dan sebagainya.

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation).

Inflasi yang berasal dari luar negeri adalah inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga di negara-negara langganan berdagang negara kita.

Kenaikan harga barang-barang yang kita impor mengakibatkan :

- a. secara langsung kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian dari barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor,
- b. secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan ongkos produksi dan kemudian, harga jual dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus di impor (*cost inflation*),
- c. secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena ada kemungkinan (tetapi ini tidak harus demikian) kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah/swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut (*demand inflation*).

Boediono (2002) menyatakan bahwa "penularan" inflasi dari luar negeri ke dalam negeri bisa pula lewat kenaikan harga barang-barang ekspor, dan saluran-salurannya hanya sedikit berbeda dengan penularan lewat kenaikan harga barang-barang impor antara lain :

1. Bila harga barang-barang ekspor (seperti kopi, teh) naik, maka indeks biaya hidup akan naik pula sebab barang-barang ini langsung masuk dalam daftar barang – barang yang tercakup dalam indeks harga.
2. Bila harga barang-barang ekspor (seperti kayu, karet timah dan sebagainya) naik, maka ongkos produksi dari barang-barang yang menggunakan barang-barang tersebut dalam produksinya (perumahan, sepatu, kaleng dan sebagainya) akan naik, dan kemudian harga jualnya akan naik pula (*cost inflation*).
3. Kenaikan harga barang-barang ekspor berarti kenaikan penghasilan eksportir (dan juga para produsen barang-barang ekspor tersebut). Kenaikan penghasilan ini kemudian akan dibelanjakan untuk membeli barang-barang (baik dari dalam maupun luar negeri). Bila jumlah barang yang tersedia di pasar tidak bertambah, maka harga-harga barang lain akan naik pula (*demand inflation*).

Penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri ini jelas lebih mudah terjadi pada negara-negara yang perekonomiannya terbuka, yaitu yang sektor perdagangan luar negerinya penting (seperti Indonesia, Korea, Taiwan, Singapura, Malaysia dan sebagainya). Namun berapa jauh penularan tersebut terjadi juga tergantung kepada kebijaksanaan pemerintah yang diambil. Dengan

kebijaksanaan-kebijaksanaan moneter dan perpajakan tertentu pemerintah bisa menetralsir kecenderungan inflasi yang berasal dari luar negeri tersebut. Sadono Sukirno (2008) menyatakan bahwa berdasarkan jenisnya inflasi dapat dibedakan menjadi :

a. Inflasi tarikan permintaan

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran ini akan menimbulkan inflasi.

b. Inflasi desakan biaya

Inflasi ini juga berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah.

Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerjaan baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

Boediono (1999) menyatakan bahwa dalam prakteknya untuk mengetahui penyebab timbulnya inflasi (terutama inflasi yang kronis atau yang telah berjalan lama) dan merumuskan dan kemudian melaksanakan kebijakan

untuk menanggulangnya, adalah masalah yang sulit dan pelik. Biasanya kita harus melampahi batas-batas ilmu ekonomi dan memasuki bidang ilmu sosiologi dan ilmu politik. Masalah inflasi dalam arti yang lebih luas bukan semata-mata masalah ekonomi, tetapi masaiah sosio-ekonomi-politis. Secara garis besar ada 3 kelompok teori mengenai penyebab terjadinya inflasi, yaitu:

1. Teori Kuantitas

Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari (a) jumlah uang yang beredar, dan (b) psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga (*expectations*). Inti dari teori ini adalah sebagai berikut:

- a. Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar (apakah berupa penambahan uang kartal atau penambahan uang giral tidak menjadi soal). Tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar, kejadian seperti, misalnya, kegagalan panen, hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Penambahan jumlah uang ibarat "bahan bakar" bagi api inflasi. Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebab musabab awal dari kenaikan harga tersebut.
- b. Laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang. Ada 3 kemungkinan keadaan, yaitu :
 - 1) Bila masyarakat tidak (atau belum) mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan-bulan mendatang. Dalam hal ini, sebagian besar dari penambahan jumlah uang yang beredar akan diterima oleh

masyarakat untuk menambah likuiditasnya (yaitu, memperbesar pos Kas dalam buku neraca para anggota masyarakat). Ini berarti bahwa sebagian besar dari kenaikan jumlah uang tersebut tidak dibelanjakan untuk pembelian barang, 2) Bila masyarakat (atas dasar pengalaman di bulan-bulan sebelumnya) mulai sadar bahwa ada inflasi. Orang-orang mulai mengharapkan kenaikan harga. Penambahan jumlah uang yang beredar tidak lagi diterima oleh masyarakat untuk menambah pos kasnya, tetapi akan digunakan untuk membeli barang-barang (memperbesar pos aktiva barang-barang di dalam neraca), 3) keadaan yang ketiga terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah yaitu tahap hiperinflasi. Dalam keadaan ini orang-orang sudah kehilangan kepercayaannya terhadap nilai mata uang. Keengganan untuk memegang uang kas dan keinginan membelanjakannya untuk membeli barang sebegitu uang kas tersebut diterima di tangan menjadi semakin meluas di kalangan masyarakat.

2. Teori Keynes

Teori ini menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bias disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan

masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (timbulnya apa yang disebut dengan inflationary gap). Inflationary gap ini timbul karena golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil menterjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan barang - barang.

3. Teori Strukturalis

Teori Strukturalis adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran (*inflexibilities*) dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian yang menurut definisi, faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang), maka teori ini bisa disebut teori inflasi "jangka panjang".

2.1.3 Teori upah

Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan yang diterima secara rutin/reguler (tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin dan tunjangan dalam bentuk natural (BPS, 2008). Menurut Gilarso (2003) balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia disebut upah (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur,

tunjangan, dsb). Masih menurut Gilarso upah biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu: upah nominal (sejumlah uang yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu). Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan/buruh). Di Indonesia banyak orang berusaha sendiri dan tidak memperhitungkan "upah" untuk dirinya sendiri. Tetapi dalam analisis ekonomi, besar kecilnya balas karya mereka sebagai tenaga kerja seharusnya ikut diperhitungkan. Tingkat upah disebut juga taraf balas karya rata-rata yang berlaku umum dalam masyarakat untuk segala macam pekerjaan. Tingkat upah ini dapat diperhitungkan per jam, hari, minggu, bulan atau tahun (Gilarso, 2003).

Sistem upah menurut Gilarso (2003) :

a. Upah menurut prestasi (upah potongan)

Upah menurut prestasi adalah besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat diterapkan kalau hasil kerja bisa diukur secara kuantitatif (dengan memperhitungkan kecepatan mesin, kualitas bahan yang dipakai, dll.).

b. Upah waktu

Upah waktu merupakan besar upah yang ditentukan atas dasar lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan. Bisa dihitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Sistem ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sukar dihitung per potong. Cara ini memungkinkan mutu pekerjaan yang baik karena karyawan tidak

tergesa-gesa; administrasinya pun dapat sederhana. Di samping itu perlu pengawasan apakah si pekerja sungguh-sungguh bekerja selama jam kerja.

c. Upah borongan

Upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok kerja. Untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya, yang kemudian dibagi-bagi antara para pelaksana. Misalnya, untuk pembangunan gedung, pembuatan sumur, dan lain-lain.

d. Upah premi

Upah premi merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi "normal" berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila seorang pekerja mencapai prestasi yang lebih dari itu, pekerja tersebut diberi "premi". Premi dapat juga diberikan, misalnya untuk penghematan waktu, penghematan bahan, kualitas produk yang baik, dan sebagainya. Dalam perusahaan modern patokan untuk prestasi minimal ditentukan secara ilmiah berdasarkan time and motion study.

e. Upah bagi hasil

Bagi hasil merupakan cara yang biasa di bidang pertanian dan dalam usaha keluarga, tetapi juga dikenal di luar kalangan itu. Misalnya, pekerja atau pelaksana diberi bagian dari keuntungan bersih; direksi sebuah PT mendapat tantieme; bahkan kaum buruh dapat diberi saham dalam PT

tempat mereka bekerja sehingga kaum buruh ikut menjadi pemilik perusahaan.

f. Peraturan gaji pegawai negeri

Gaji Pegawai Negeri Sipil (GPNS) berdasarkan dua prinsip : pendidikan dan masa kerja. Setiap orang yang diangkat sebagai pegawai negeri mendapat gaji pokok yang ditentukan oleh golongan dan masa kerja.

Secara empiris besarnya tingkat upah sangat dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu (Aris Ananta, 1990) :

a. Kebutuhan fisik minimum

Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) merupakan kebutuhan pokok seseorang yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya agar dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu faktor produksi yang dilihat dari kualitas barang dan jasa yang dibutuhkan.

b. Indeks harga konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan petunjuk mengenai naik turunnya harga kebutuhan hidup, peningkatan terhadap harga kebutuhan hidup ini secara tidak langsung dapat mencerminkan tingkat inflasi.

c. Pertumbuhan ekonomi daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keadaan perekonomian dalam suatu daerah yang mempunyai hubungan pertumbuhan dan kondisi perusahaan yang beroperasi di daerah yang bersangkutan.

2.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Arsyad (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung ataupun tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja. Tolok ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah diantaranya adalah PDRB daerah tersebut dan pertumbuhan penduduk yang bermuara pada tingkat kesempatan kerja. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor – faktor produksi. PDRB juga merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan dari seluruh aktivitas ekonomi suatu daerah atau sebagai nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah.

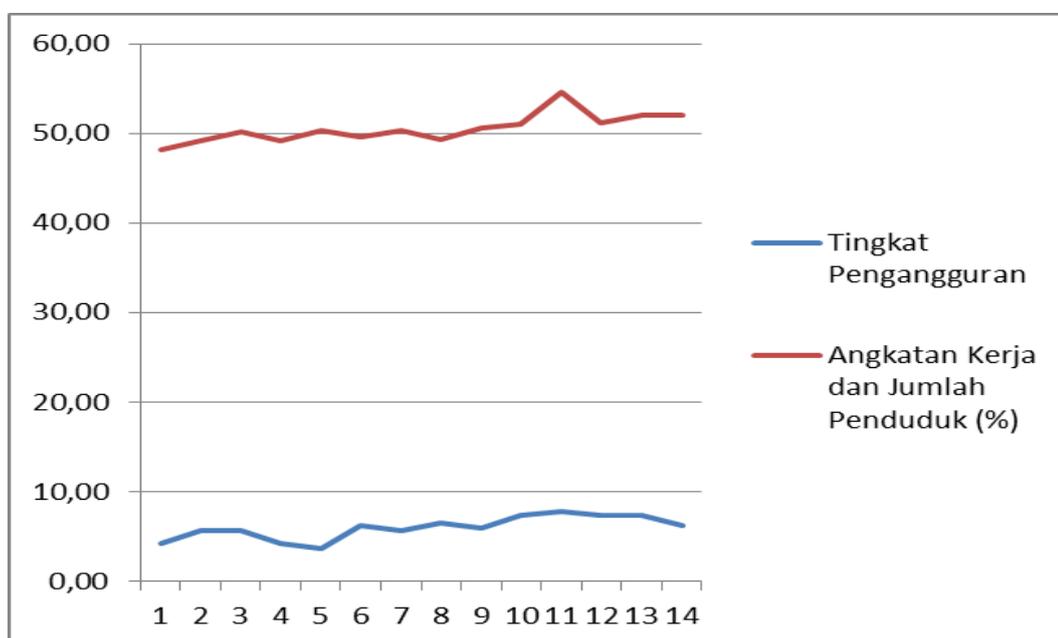
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 2000. Produk

Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 2004), sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.

2.1.5 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Tingkat Pengangguran

Kenaikan jumlah penduduk yang di Jawa Tengah mengakibatkan kenaikan jumlah angkatan kerja. Akan tetapi, kenaikan jumlah angkatan kerja tersebut, tidak dibarengi oleh meningkatnya kesempatan kerja, akibatnya angkatan kerja yang jumlahnya bertambah tersebut, tidak dapat didistribusikan ke lapangan pekerjaan. Hal ini akan berdampak pada tingkat pengangguran yang terus bertambah.

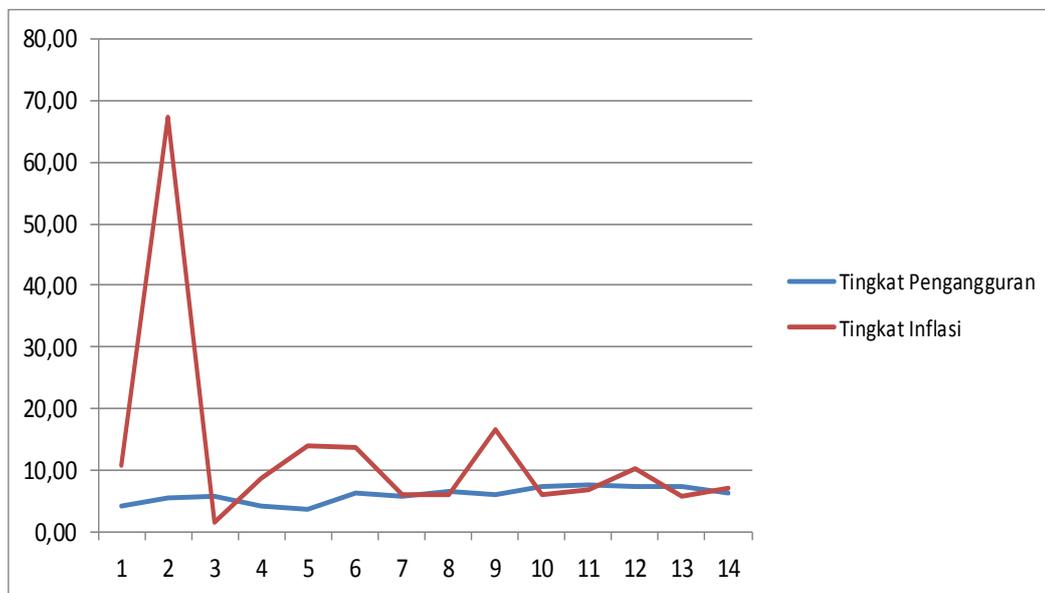
Gambar 2.1
Hubungan Jumlah Penduduk dengan Tingkat Pengangguran
di Jawa Tengah Periode Tahun 1997-2010



2.1.6 Hubungan Tingkat Inflasi dengan Tingkat Pengangguran

Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negatif dengan tingkat pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berhubungan dengan tingkat pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi (Sadono Sukirno, 1994). Dengan adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi dan pengangguran kedudukannya naik (tidak ada trade off) maka menunjukkan bahwa adanya perbedaan dengan kurva philips dimana terjadi trade off antara inflasi yang rendah atau pengangguran yang rendah. (Nopirin,2000). Pada awalnya, kurva Phillips memberikan gambaran kasar mengenai kausalitas proses inflasi. Rendahnya tingkat pengangguran dianggap memiliki keterkaitan dengan ketatnya pasar tenaga kerja dan tingginya tingkat pendapatan dan permintaan dari konsumen. Kurva Phillips juga memberikan gagasan mengenai pilihan (trade off) antara pengangguran dan inflasi. Jika tingkat inflasi yang diinginkan adalah rendah, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika tingkat inflasi yang diinginkan tinggi, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang relatif rendah (Dernburg dan Karyaman Muchtar, 1992).

Gambar 2.2
Hubungan Inflasi dengan Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah
Periode Tahun 1997-2010



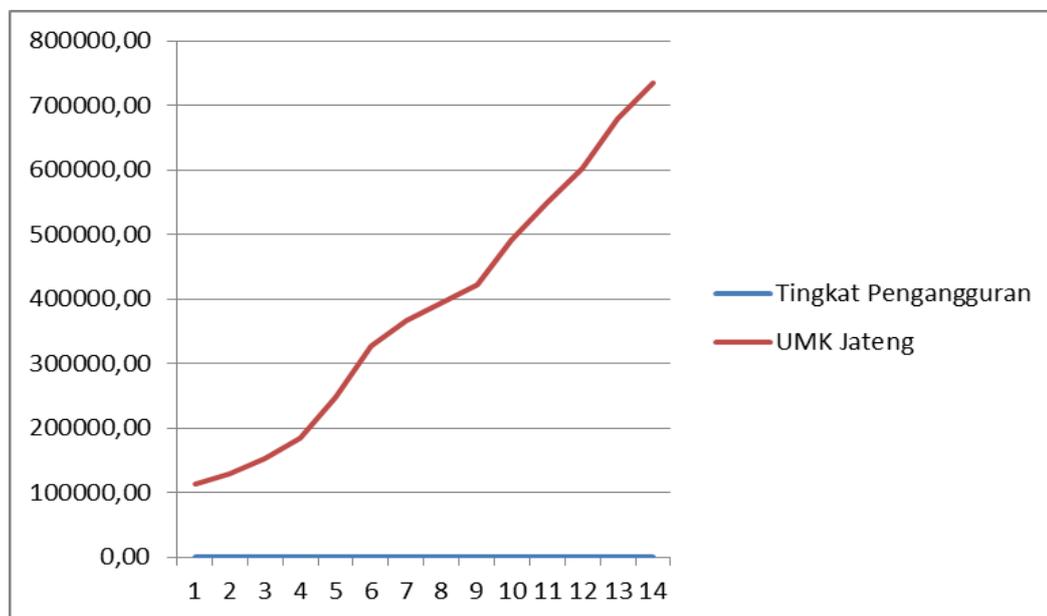
Gambar diatas, menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) pengangguran berkurang.

2.1.7 Hubungan Besaran Upah dengan Tingkat Pengangguran

Hubungan besaran upah yang berhubungan dengan tingkat pengangguran dijelaskan oleh Kaufman dan Hotckiss (1999). Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut, seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan pengangguran.

Menurut Samuelson (1997), peningkatan upah menimbulkan dua efek yang bertentangan atas penawaran tenaga kerja. Pertama, efek substitusi yang mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih lama, karena upah yang diterimanya dari tiap jam kerja lebih tinggi. Kedua, Efek pendapatan mempengaruhi segi sebaliknya, yaitu tingginya upah menyebabkan pekerja ingin menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan lebih banyaknya komoditi yang dibeli. Pada suatu tingkat upah tertentu, kurva penawaran tenaga kerja akan berlekuk kebelakang (*backward bending curve*).

Gambar 2.3
Hubungan Upah dengan Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah
Periode Tahun 1997-2010



2.1.8 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Pengangguran

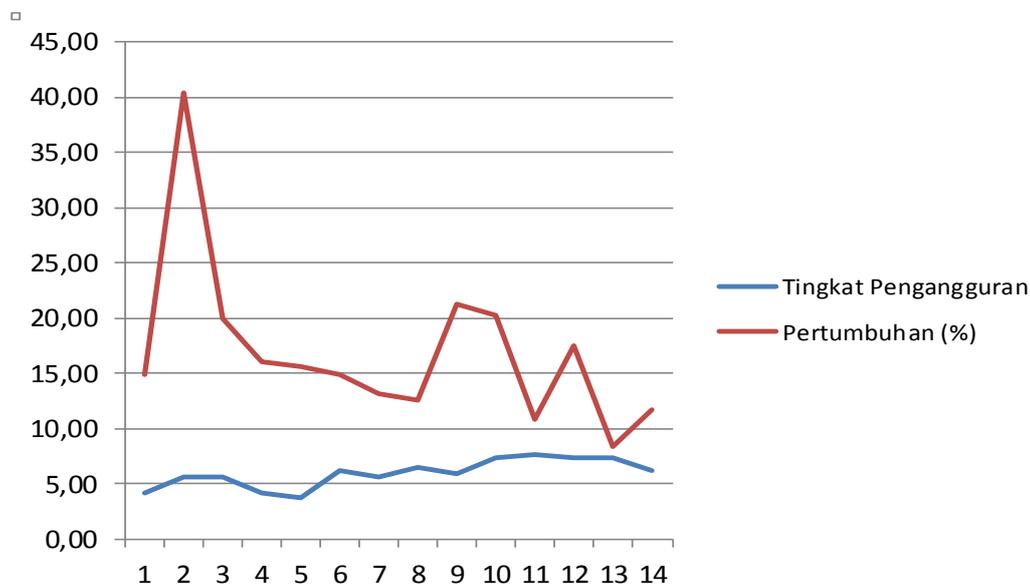
Arsyad (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung ataupun tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja.

Tolok ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah diantaranya adalah PDRB daerah tersebut dan pertumbuhan penduduk yang bermuara pada tingkat kesempatan kerja. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor - faktor produksi.

PDRB juga merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan dari seluruh aktivitas ekonomi suatu daerah atau sebagai nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah. Mengambil analisis makro Produk Domestik Regional Bruto dapat dihitung berdasarkan harga konstan atau berdasarkan harga berlaku.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 2000. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 2005), sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.

Gambar 2.4
Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Pengangguran
di Jawa Tengah Periode Tahun 1997-2010



2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian oleh John Dinarno dan Mark P. Moore (1999), yang berjudul "Analisa Hubungan Antara Pengangguran dan Inflasi dalam Perekonomian Terbuka dengan Menggunakan Data Panel". Pada penelitian yang dilakukan ini berupaya untuk mencari hubungan antara tingkat inflasi (melalui GDP Deflator) dengan tingkat pengangguran yang terjadi di sembilan negara OECD (Open Economic Countries Development) antara lain : Belgia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan panel data dengan model penghitungan OLS (Ordinary

Least Square). Data yang digunakan antara lain adalah data cross section pada tingkat inflasi (menggunakan IHK, kuartal), tingkat pengangguran dan tingkat suku bunga (untuk mengukur harapan inflasi di masa datang). Dari penelitian ini dihasilkan adanya hubungan yang positif antara tingkat inflasi melalui GDP Deflator dengan tingkat pengangguran yang terjadi. Semakin tinggi tingkat inflasi yang terjadi di suatu negara maka akan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran yang ditimbulkannya.

2. Penelitian oleh Amri Amir (2007) yang berjudul "Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia". Pada penelitian ini penulis ingin meneliti seberapa besar hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Indonesia. Penelitian ini juga mengacu pada analisis kurva phillips serta menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan dengan tingkat pengangguran dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen, maka pengangguran akan menurun sekitar 0,46 persen. Dengan demikian, penggambaran kurva phillips yang menghubungkan inflasi dengan tingkat pengangguran untuk kasus Indonesia tidak tepat untuk digunakan sebagai kebijakan untuk menekan tingkat pengangguran. Hasil analisis statistik pengujian pengaruh inflasi terhadap pengangguran selama periode 1980 – 2005 ditemukan bahwa

tidak ada pengaruh yang nyata antara inflasi dengan tingkat pengangguran.

3. Penelitian Farid Alghofari (2010) tentang Analisis Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1980-2007 bertujuan untuk menganalisis hubungan jumlah penduduk, tingkat inflasi, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah pengangguran di Indonesia dari tahun 1980-2007. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif, yaitu mendeskripsikan data dan grafik yang tersaji dan analisis korelasi untuk mengetahui besarnya tingkat hubungan antar variabel. Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah penduduk, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi memiliki kecenderungan hubungan positif dan kuat terhadap jumlah pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah penduduk dan angkatan kerja, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan kenaikan jumlah pengangguran. Sedangkan tingkat inflasi hubungannya positif dan lemah, hal ini mengindikasikan tingkat inflasi tidak memiliki hubungan terhadap jumlah pengangguran.
4. Indra Oloan Nainggolan (2007) melakukan penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara dengan menggunakan data

panel. Dengan variable bebas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota, Tingkat Bunga Kredit, Upah Minimum Kabupaten/Kota di Propinsi (UMK) sedangkan variabel terikat adalah kesempatan kerja. Metode analisis yang dipergunakan adalah Metode Generalized Least Square (GLS) dengan Random Efek Model (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota berpengaruh positif sebesar 76,38% dan signifikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negatif sebesar 53,06% dan signifikan, dan Tingkat Bunga Kredit berpengaruh negatif sebesar 7,29% dan tidak signifikan terhadap kesempatan bekerja pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kenaikan jumlah penduduk yang terjadi di Jawa Tengah mengakibatkan lonjakan angkatan kerja. Akan tetapi dengan sempitnya lahan pekerjaan di Jawa Tengah, para angkatan kerja tersebut tidak akan terserap sepenuhnya, bahkan tidak terserap dalam jumlah banyak banyak. Akibatnya pengangguran pun meningkat. Hal ini sejalan dengan pendapat kaum klasik, yang menyatakan bahwa penduduk yang semakin bertambah jumlahnya akan mengakibatkan penurunan pada pendapatan nasional, hal ini akan berdampak secara tidak langsung terhadap tingkat pengangguran.

Tingkat inflasi dapat memiliki hubungan positif atau negatif dengan besarnya tingkat pengangguran yang terjadi. Peningkatan pada inflasi akan

berhubungan dengan tingkat pengangguran. Hal ini terjadi sebagai akibat dari peningkatan pada tingkat inflasi akan menurunkan tingkat investasi, akibatnya tingkat pengangguran naik seiring kesempatan kerja yang rendah. Di samping itu, inflasi juga dapat memberikan hubungan positif dengan tingkat pengangguran. Hal ini terjadi karena didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan naik, harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) pengangguran akan berkurang.

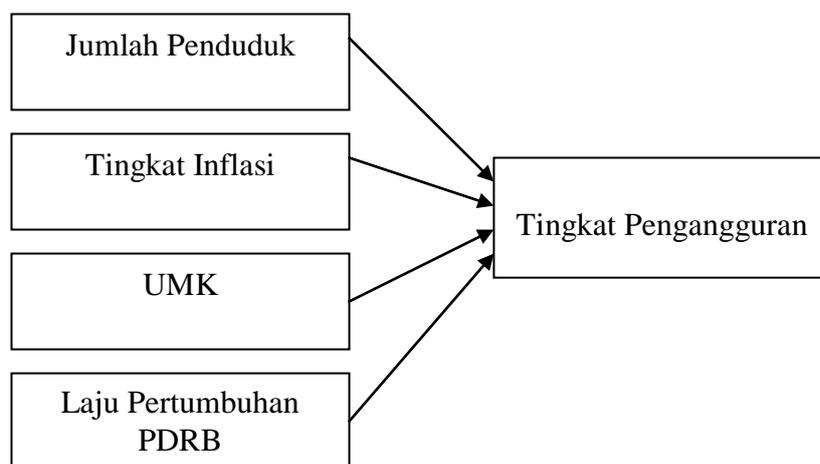
Besaran upah dapat memiliki hubungan positif atau negatif dengan tingkat pengangguran. Hal ini terjadi karena upah minimum yang diterima adalah upah terendah yang akan diterima oleh pencari kerja. Hal tersebut memiliki hubungan antara seseorang untuk menganggur dalam waktu tertentu untuk mencari pekerjaan terbaik dan tentunya upah yang tinggi. Jika tenaga kerja menetapkan upah tertentu sebagai upah minimum yang diterima dan seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah besaran upah tersebut maka seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut. Pada pihak pengusaha, penetapan upah minimum yang tinggi akan menyebabkan tingkat pengangguran yang bertambah. Hal ini dikarenakan perusahaan mengambil kebijakan efisiensi biaya produksi dengan mengurangi tenaga kerja. Besaran yang digunakan untuk mengukur

tingkat pengangguran yang dilakukan adalah dengan besaran upah rata-rata *per* propinsi dalam satu tahun.

Pertumbuhan ekonomi melalui penambahan PDRB akan berhubungan dengan tingkat pengangguran, Setiap adanya peningkatan terhadap persentase pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat diperoleh kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.5
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan gambar 2.2 dapat dilihat kerangka pemikiran penelitian ini. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan hubungan antara jumlah penduduk dengan tingkat pengangguran. Selain itu, penelitian ini melihat hubungan inflasi

dengan tingkat pengangguran, UMK dengan tingkat pengangguran dan laju pertumbuhan dengan tingkat pengangguran di Jawa Tengah.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah teori sementara yang kebenarannya masih perlu diuji setelah peneliti mendalami permasalahan penelitiannya dengan seksama serta menetapkan anggapan dasar (Arikunto, 2006). Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Terdapat hubungan antara jumlah penduduk dengan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah.
- H2 : Terdapat hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah.
- H3 : Terdapat hubungan antara rata – rata upah minimum kabupaten / kota dengan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah.
- H4 : Terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara kerja atau prosedur mengenai bagaimana kegiatan yang akan dilakukan untuk mengumpulkan dan memahami objek-objek yang menjadi sasaran dari penelitian yang dilakukan (Mohammad Nazir, 2003).

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian, sedangkan Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberikan arti (Mohammad Nazir, 2003). Jadi variabel penelitian ini meliputi faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas).

1. Variabel dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel dependen adalah tingkat pengangguran, yaitu dimana jumlah penduduk mencari kerja, yang termasuk angkatan kerja namun tidak melakukan pekerjaan atau sedang mencari kerja. Variabel tingkat pengangguran yang digunakan adalah tingkat pengangguran di Jawa Tengah , dengan menggunakan data dari BPS yaitu data orang.

usia (15 tahun keatas) yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan, belum memulai bekerja. Data yang diambil bersifat tahunan, dari tahun 1997-2010 dan satuan yang digunakan adalah jiwa / orang.

2. Variabel independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk, tingkat inflasi, besaran upah dan pertumbuhan ekonomi melalui PDRB.

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh penduduk Jawa Tengah tahun 1997-2010 dengan satuan jiwa/orang.

b. Tingkat inflasi

Tingkat inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi yang menunjukkan besarnya perubahan harga-harga secara umum pada periode waktu tertentu secara tahunan (tahun 1997-2010).

Perhitungan ini menggunakan besarnya laju inflasi gabungan di Jawa Tengah dalam periode 1 tahun (year on year) dengan satuan persen

c. Besaran upah

Besaran upah dalam penelitian ini mengacu pada rata – rata upah minimum kabupaten / kota di Jawa Tengah. Satuan besaran upah yang digunakan dalam penelitian ini adalah satuan rupiah.

d. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini mengacu pada PDRB Jawa Tengah. PDRB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu daerah tertentu dalam satu tahun tertentu. PDRB yang dimaksud adalah laju pertumbuhan PDRB provinsi Jawa Tengah atas dasar harga berlaku untuk periode pada tahun 1997– 2010 (dalam satuan persen).

Formula yang digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi adalah (Arsyad, 1999)

$$G_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100 \dots\dots\dots(3.1)$$

Dimana : G_t : Tingkat pertumbuhan ekonomi dinyatakan persen

Y_t : Pendapatan pada tahun t

Y_{t-1} : Pendapatan pada t -1

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Suharsimi, 1998). Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang sudah diterbitkan atau sudah digunakan pihak lain (Suharyadi dan Purwanto, 2003). Data sekunder merupakan

data-data penunjang dalam penelitian ini yang diperoleh dari lembaga/instansi yang terkait dalam penelitian ini, antara lain BPS Provinsi Jawa Tengah.

Data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah:

1. Data mengenai tingkat pengangguran dan jumlah penduduk di Jawa Tengah selama periode tahun 1997-2010 yang bersumber dari Statistik Jawa Tengah tahun 1997-2010.
2. Data mengenai tingkat inflasi year on year di Indonesia pada tahun 1997-2010 yang bersumber dari Statistik Jawa Tengah tahun 1997-2010.
3. Data mengenai rata – rata upah minimum kabupaten / kota di provinsi Jawa Tengah pada periode 1997-2010 yang bersumber dari Statistik Jawa Tengah tahun 1997-2010.
4. Data mengenai laju pertumbuhan PDRB di Jawa Tengah berdasarkan atas dasar harga berlaku yang bersumber dari data yang tersaji Statistik Jawa Tengah (dalam satuan persen).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan realistis. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka sebagai metode pengumpulan data, dan wawancara dengan dinas terkait (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) guna mendukung suatu teori. Periode data yang akan digunakan

dalam penelitian ini adalah tahun 1997–2010. Sebagai pendukung data juga diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, browsing internet , serta koran-koran.

3.4 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan studi yang diterapkan adalah metode analisis statistik deskriptif dan analisis korelasi, yaitu menganalisis dan menginterpretasikan hubungan antar variabel melalui data. Penelitian ini menggunakan analisis deskripsi data secara grafis, yaitu dengan menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafis, lalu diinterpretasikan dengan melihat hubungan dan kecenderungan antar variabel dengan melihat data-data tingkat pengangguran dan faktor-faktor yang berhubungan seperti jumlah penduduk, tingkat inflasi, upah minimum kabupaten / kota, dan laju pertumbuhan PDRB di Jawa Tengah, lalu dilihat hubungan dan kecenderungan antar variabel tersebut melalui nilai koefisien korelasi antar variabel-variabel tersebut. Pada penelitian ini menggunakan SPSS untuk mengolah data dan mencari nilai koefisien korelasi.

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah metode-metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan (Mason, 1996). Pendekatan ini berangkat dari data, ibarat bahan baku dalam suatu pabrik, data ini diproses dan dimanipulasi menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan. Pemrosesan dan manipulasi data mentah menjadi informasi yang

bermanfaat yang merupakan jantung dari analisis kuantitatif. Analisis statistik merupakan analisis yang paling luas diterapkan dalam bisnis. Penelitian yang disebut survei secara umum menggunakan analisis statistik (Mudrajad Kuncoro, 2004).

3.4.2 Analisis Korelasi

Analisis korelasi merupakan analisis yang bertujuan untuk mengukur kuat atau derajat hubungan antar dua variabel, sangat erat berhubungan tetapi sangat berbeda dalam konsep dari analisis regresi (Gujarati, 1998). Menurut Mason (1996) analisis korelasi adalah sekumpulan teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan (korelasi) antara dua variabel. Fungsi utama analisis korelasi adalah untuk menentukan seberapa erat hubungan antara dua variabel. Salah satu ukuran yang menyatakan keeratan hubungan adalah koefisien korelasi. Koefisien ini bernilai -1 sampai dengan +1. Ukuran ini dapat digunakan pada data berskala selang dan rasio.

Menurut Noegroho Boedijoewono (2001) korelasi merupakan analisis yang tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat antara variabel dependen dan independen. Pada korelasi dijelaskan besarnya tingkat hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Korelasi hanyalah menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan berapa besarnya hubungan antara dua variabel tersebut. Adanya korelasi antara suatu variabel dengan variabel lain disebabkan karena adanya satu atau beberapa sebab sebagai berikut:

- a. Korelasi yang benar-benar ditimbulkan dua faktor kebetulan saja.
- b. Variabel yang mempunyai korelasi sebenarnya berhubungan oleh variabel atau faktor-faktor lain.
- c. Kedua variabel yang mempunyai hubungan sulit ditunjukkan mana sebagai faktor penyebab dan mana yang menjadi faktor akibat.

Untuk menghitung besarnya korelasi antar variabel dapat digunakan rumus Karl Pearson's (Mason, 1996):

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}} \dots\dots\dots(3.2)$$

di mana :

r = Koefisien Korelasi

N = Jumlah Frekuensi

X = Variabel Independen

Y = Variabel Dependen

3.4.2.1. Arti Nilai Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi dari suatu perhitungan berkisar antara +1 dan -1, koefisien korelasi yang bertanda (+) menunjukkan arah korelasi yang positif, sedangkan yang bertanda (-) menunjukkan arah yang negatif. Sementara itu bila koefisien korelasi bernilai 0, berarti tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Koefisien korelasi bernilai 1, berarti hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya kuat.

Sarwono (2006) menjabarkan kriteria nilai koefisien korelasi sebagai berikut :

0	= tidak ada korelasi
$> 0 - 0,25$	= korelasi sangat lemah
$> 0,25 - 0,5$	= korelasi cukup kuat
$> 0,5 - 0,75$	= korelasi kuat
$> 0,75 - 0,99$	= korelasi sangat kuat
1	= korelasi sempurna

3.4.2.2. Arah Hubungan Korelasi

Dalam korelasi, ada dua arah korelasi, yaitu korelasi searah dan tidak searah. Arah korelasi dilihat dari angka koefisien korelasi. Pertama, korelasi positif, atau direct correlation, yaitu apabila perubahan pada satu variabel diikuti oleh perubahan pada variabel yang lain dengan arah yang sama. Kedua, korelasi negatif atau inverse correlation (negative correlation), yaitu apabila perubahan pada satu variabel diikuti oleh perubahan pada variabel lain dengan arah yang berlawanan.

3.4.2.3. Melihat Signifikansi Hubungan

Melihat signifikansi hubungan merupakan interpretasi dengan didasarkan pada angka signifikansi yang didasarkan dari perhitungan. Interpretasi ini akan membuktikan apakah

hubungan antar variabel tersebut signifikan atau tidak. Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya hubungan antara variabel signifikan.
- b. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima, artinya hubungan antara variabel tidak signifikan.

Statistik pengujian : Uji t $t\text{hitung} = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$